

ANALISIS PERBANDINGAN INFRASTRUKTUR DAN KURIKULUM PENDIDIKAN ANTARA
INDONESIA DAN MALAYSIATia Akta Malia¹, Rossa Aulia², Husna Khoirani³, Aprizal Ahmad⁴

UIN Imam Bonjol Padang

E-mail: tiaaktamalia@gmail.com, auliarossaf09@gmail.com, husnakhorani40@gmail.com,
apriz94722@gmail.com**Abstract**

The comparison of educational provision in Indonesia and Malaysia focuses on the quality of learning services, the implementation of national curriculum standards, and the policy directions that shape the education systems in both countries. This discussion aims to illustrate how each nation formulates educational policies to improve learning quality while ensuring equitable access for all students. Malaysia is often regarded as having stronger consistency in providing educational facilities, enforcing centralized competency standards, and maintaining uniform policies across its regions. The standardization implemented in Malaysia enables the learning process to achieve relatively equal quality in both urban and remote areas. Conversely, Indonesia has shown significant progress in enhancing its education quality, particularly through policy reforms and strengthened national programs. However, the country continues to face challenges such as regional disparities, variations in school service quality, and inconsistencies in the implementation of established learning standards. Indonesia's more flexible policy framework allows for greater innovation but also results in considerable differences in practice across regions. The comparison reveals that Malaysia adopts a more structured and standardized approach, whereas Indonesia tends to pursue policies that are more responsive and context-specific. These differences reflect each country's strategy in aligning its education system with societal needs, technological advancements, and global demands for high-quality education in the 21st century. Through this study, it is expected that new perspectives will emerge to guide the strengthening of educational policies in Indonesia, particularly by learning from Malaysia's best practices to achieve equitable and sustainable improvements in educational quality.

Keywords : Indonesian Education; Malaysian Education; National Learning Standards; Education Policy Development.

Abstrak

Perbandingan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dan Malaysia berfokus pada mutu layanan belajar, penerapan standar kurikulum nasional, serta arah kebijakan pendidikan yang mendasari sistem pendidikan di masing-masing negara. Diskusi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kedua negara merumuskan kebijakan pendidikan demi meningkatkan kualitas

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No

234.GT8.,35

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author Publish by
: Sindoro

This work is licensed under a

Creative CommonsAttribution-NonCommercial4.0 International License

pembelajaran serta menjamin bahwa semua peserta didik mendapatkan akses yang setara. Malaysia dianggap memiliki konsistensi yang lebih baik dalam menyediakan sarana pendidikan, menerapkan standar kompetensi yang terpusat, dan mengatur kebijakan yang seragam di seluruh wilayahnya. Konsep standardisasi yang diimplementasikan di Malaysia memungkinkan proses pembelajaran memiliki kualitas yang relatif merata, baik di daerah urban maupun daerah terpencil. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dalam peningkatan kualitas pendidikan, terutama melalui reformasi kebijakan dan penguatan program-program nasional. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi masalah ketimpangan antar wilayah, variasi dalam kualitas layanan sekolah, dan perbedaan dalam penerapan standar pembelajaran yang telah ditentukan. Kebijakan pendidikan Indonesia yang lebih fleksibel memberikan peluang untuk inovasi yang lebih besar, namun juga menciptakan perbedaan yang cukup signifikan dalam pelaksanaannya. Perbandingan antara kedua negara menunjukkan bahwa Malaysia berfokus pada pendekatan yang lebih terencana dan terstandarisasi, sedangkan Indonesia memilih kebijakan yang lebih responsif dan kontekstual. Perbedaan ini mencerminkan strategi masing-masing negara dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, serta tuntutan global terhadap mutu pendidikan di abad ke-21. Melalui studi ini, diharapkan dapat muncul perspektif baru yang dapat menjadi acuan dalam memperkuat kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama dengan belajar dari praktik baik yang ada di Malaysia untuk mencapai pemerataan dan peningkatan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Pendidikan Indonesia, Pendidikan Malaysia, Standar Pembelajaran Nasional, Pengembangan Kebijakan Pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah elemen krusial untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan berpengaruh terhadap daya saing negara. Dalam konteks ini, Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara yang sedang berkembang di Asia Tenggara terus memperbaharui sistem pendidikannya untuk memenuhi tuntutan internasional, perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang semakin rumit. Meskipun memiliki perbedaan dalam sejarah, budaya, dan struktur pemerintahan, keduanya sepakat untuk meningkatkan akses, kualitas pendidikan, dan pemerataan layanan pendidikan.

Indonesia menggunakan pendekatan pendidikan yang lebih desentralisasi, di mana banyak pengelolaan dilakukan oleh daerah. Model ini memberi keleluasaan untuk menyesuaikan program pendidikan sesuai kebutuhan lokal, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam hal kesenjangan kualitas antara berbagai daerah. Perbedaan dalam akses terhadap sarana dan prasarana, kualitas guru, serta pelaksanaan kurikulum mempengaruhi pemerataan mutu pendidikan di seluruh negeri. (Suyanto & Jihad, 2013).

Sementara itu, Malaysia mengadopsi sistem pendidikan yang lebih terpusat dengan pengawasan ketat dari Kementerian Pendidikan. Susunan ini memungkinkan adanya standarisasi kurikulum, keseragaman kebijakan, dan distribusi fasilitas pendidikan yang lebih

terencana. Kebijakan pendidikan di Malaysia yang stabil dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penunjang konsistensi kualitas pembelajaran di sejumlah wilayah.

Melakukan perbandingan antara kedua negara sangatlah penting untuk mengenali pola kebijakan, keunggulan, serta tantangan yang dihadapi oleh masing-masing sistem pendidikan. Dengan analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang baru yang bermanfaat untuk memperkuat kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pemerataan kualitas pendidikan dan efektivitas pelaksanaan standar nasional. Studi komparatif juga membuka kemungkinan untuk mengadopsi praktik baik yang terbukti memberikan hasil positif baik di tingkat regional maupun global. (Nair & Alwee, 2012).

B. PEMBAHASAN

1. Pendidikan Indonesia

Penyelenggaraan pengajaran di seluruh wilayah Nusantara mempunyai corak yang beragam. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan kesempatan di setiap wilayahnya, juga menyimpan keberagaman budaya, pengetahuan tradisional, dan keunikan yang berbeda-beda (Fitria, 2024). Maka dari itu, perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama untuk semua warga negara Indonesia adalah hal yang krusial untuk mencapai kemajuan. Anak-anak akan lebih cepat menyerap materi pelajaran dan mampu menggali ilmu dari lingkungan sekitarnya apabila proses belajarnya terintegrasi dengan nilai-nilai budaya setempat. Di samping itu, melalui pengetahuan lokal, siswa bisa menumbuhkan semangat cinta tanah air dan mempererat persatuan meskipun terdapat keberagaman. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini lebih berorientasi pada aspek pemahaman dan pengetahuan, contohnya nilai ulangan dan hasil belajar lainnya (Niswah dan Sassi, 2023), sehingga kurang memperhatikan aspek perasaan dan keterampilan gerak. Guna mengurangi kesenjangan yang ada, sistem pendidikan di Indonesia memerlukan peningkatan signifikan, terutama dalam aspek penentuan target belajar dan pembentukan kepribadian. Saat ini dunia pendidikan di tanah air memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara apa yang dicita-citakan dengan apa yang sebenarnya terjadi (Wurdiyanto et al. , 2024).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kegiatan belajar mengajar yang terstruktur dan diakui pemerintah mulai dilaksanakan secara sah di seluruh negeri. Walaupun demikian, kegiatan belajar-mengajar di wilayah yang kini bernama Indonesia sudah berlangsung lama sebelumnya. Terdapat berbagai macam cara belajar yang dilakukan secara turun temurun, serta tata cara pendidikan dari penjajah Belanda yang mulai diterapkan sekitar tahun 1800-an. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada bagian Pasal 31, sangat menekankan betapa krusialnya pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia, serta menggaris bawahi tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan tersebut. Sistem pembelajaran di tanah air mengalami kemajuan melalui tahapan yang lama, dengan dipengaruhi berbagai hal seperti masa lalu, keadaan masyarakat, juga tujuan peraturan pemerintah. Landasan legal yang mengendalikan pelaksanaan pengajaran di semua tingkatan dari sekolah dasar sampai universitas berpedoman pada UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Kerangka Pendidikan Nasional. Sistem yang ada ini dibuat dengan maksud utama yaitu membentuk pribadi yang memiliki keyakinan kuat, bermoral, cerdas, dan juga dapat berkontribusi positif dalam kemajuan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memiliki tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari pendidikan tingkat awal, tingkat lanjutan, hingga tingkat universitas, selain itu juga terdapat pendidikan di luar sekolah dan pendidikan yang diperoleh dari lingkungan keluarga dan masyarakat

yang bertujuan supaya semua orang dari berbagai kalangan bisa mendapatkan pendidikan.

Beberapa tahun belakangan ini, terjadi perubahan besar di dunia pendidikan Indonesia, termasuk perubahan kurikulum yang lebih fokus pada kemampuan praktis, cara berpikir yang mendalam, dan pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan teknologi modern. Dapat dilihat dari penerapan Kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada pengembangan budi pekerti dan peningkatan kemampuan dalam ranah sains dan teknologi, juga kebijakan Merdeka Belajar yang menyerahkan kewenangan lebih besar kepada satuan pendidikan dan peserta didik dalam menetapkan cara belajar Sibuea, H. Y. P. (2017). Dengan demikian, persoalan seperti tidak meratanya kesempatan belajar antara wilayah kota dan desa, mutu pengajar, serta minimnya fasilitas di daerah terpencil tetap menjadi penghalang kemajuan. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah tak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan beragam cara. Upaya ini mencakup penerapan teknologi digital dalam proses belajar mengajar, peningkatan kemampuan para tenaga pengajar, serta penyediaan layanan pendidikan yang merata agar seluruh anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. (Sari, 2022).

2. Pendidikan Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara pionir dalam ASEAN dengan luas total 329,758 km² yang terletak antara 1° hingga 7° Lintang Utara dan 100° hingga 119° Bujur Timur, memiliki suhu rata-rata berkisar antara 21°C hingga 32°C (Sabah Departement of Statistics, 2002). Negara ini terdiri dari dua wilayah utama yang dipisahkan oleh Laut China Selatan, yaitu Malaysia Barat atau Semenanjung Malaysia yang berbatasan dengan Thailand di sisi utara dan Singapura di sisi selatan, sedangkan Malaysia Timur terletak di bagian utara Pulau Kalimantan yang langsung berbatasan dengan Indonesia di selatan dan Brunei di utara. Malaysia adalah sebuah negara yang berada di Asia Tenggara dengan populasi yang beragam secara etnis. Etnis Melayu adalah kelompok mayoritas, menyumbang 50,1% dari total penduduk, diikuti oleh etnis Cina sebanyak 22,6%, kelompok pribumi lain 11,8%, etnis India 6,7%, dan kelompok lainnya sebesar 0,7%. Penduduk yang bukan warga negara menyentuh 8,2% dari total populasi di Malaysia. Keberagaman ini menciptakan masyarakat yang kaya akan berbagai agama, makanan, budaya, dan tradisi. Sistem pendidikan di Malaysia sangat dipengaruhi oleh warisan dari kolonial Inggris yang memberikan dampak signifikan pada struktur pendidikan di negara ini, mirip dengan situasi di beberapa mantan koloni lainnya seperti India. Sebelum masuknya pengaruh Inggris, pendidikan di Malaysia berorientasi pada ajaran Islam yang diajarkan melalui pondok dan madrasah. Namun, dengan kedatangan Inggris, sekolah-sekolah dengan pengantar bahasa Inggris muncul, tetapi akses pendidikan ini terbatas hanya untuk kelompok elit Melayu yang mampu berbahasa Inggris, sedangkan banyak masyarakat Melayu mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan karena kendala bahasa. Lebih lanjut, Inggris memperkenalkan sistem pendidikan yang terpisah berdasarkan etnis, dengan sekolah-sekolah yang dibedakan bagi etnis Melayu, Cina, dan India, yang berujung pada pemisahan sosial yang bertahan lama. (Putri and Rahayu, 2022.)

Setelah meraih kemerdekaan, Malaysia melakukan langkah signifikan dalam merancang sistem pendidikan untuk mendorong integrasi nasional, memenuhi permintaan pasar tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas pendidikan berbasis sains serta teknologi. Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa pengantar utama dalam pendidikan nasional untuk memperkuat identitas bangsa. Pada tahun 1983, Malaysia memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR), yang diikuti oleh Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989. Kedua kurikulum tersebut

bertujuan untuk menyatukan berbagai kelompok etnis dan menyesuaikan pendidikan dengan visi nasional. Selain itu, sejumlah kebijakan seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB), Dasar Pembangunan Negara, dan Dasar Wawasan Negara dicanangkan untuk membangun sistem pendidikan yang berorientasi global. (Mustika et al. , 2022)

3. Standar Pembelajaran Nasional

a. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran adalah landasan penting dalam Standar Pembelajaran Nasional karena fase ini menentukan arah untuk seluruh proses pendidikan yang akan dilakukan di kelas. Proses perencanaan meliputi pengaturan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, pemilihan materi ajar, strategi pengajaran, penggunaan media, dan penyusunan alat penilaian yang sesuai dengan target pembelajaran. Proses ini mengharuskan guru untuk memiliki kemampuan dalam menganalisis kurikulum serta memahami karakter siswa agar pembelajaran menjadi relevan dan sesuai konteks. Perencanaan yang terstruktur dan terukur dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, karena guru dapat meramalkan kebutuhan siswa dan potensi kendala yang mungkin muncul. Perencanaan yang baik juga berdampak pada kemandirian belajar serta pencapaian kompetensi siswa dalam jangka panjang.

Perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan standar memastikan bahwa semua sekolah, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, memiliki acuan yang seragam dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Ini menjadi sangat penting mengingat adanya tantangan pemerataan pendidikan di Indonesia yang masih berlangsung hingga saat ini. Perencanaan nasional juga berperan sebagai alat untuk pengawasan mutu, sehingga pembelajaran tidak hanya tergantung pada kreativitas guru, tetapi mengikuti pedoman kurikulum yang telah disusun secara ilmiah oleh pemerintah dan para ahli pendidikan. (Tilaar (2012)

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran adalah fase di mana interaksi antara guru dan siswa berlangsung secara langsung. Pada fase ini, standar pelaksanaan menekankan bahwa guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung proses belajar yang aktif, kreatif, kolaboratif, dan bermakna. Model pembelajaran yang diterapkan harus memperhatikan siswa sebagai pusat pembelajaran, menyertakan teknologi, serta mendorong kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Pembelajaran yang efektif harus dirancang agar siswa terlibat secara aktif melalui diskusi kelompok, proyek bersama, penelitian, atau model pembelajaran yang berfokus pada masalah. Guru tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya sumber informasi, tetapi sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri.

Dalam kerangka Standar Pembelajaran Nasional, pelaksanaan pembelajaran juga mensyaratkan adanya pengaturan kelas yang mendukung, lingkungan belajar yang aman, dan pemanfaatan media pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Kualitas pelaksanaan pembelajaran sangat berdampak pada keberhasilan pengimplementasian kurikulum, sehingga kompetensi pedagogik guru sangat penting untuk diperhatikan. (Suprijono 2015).

c. Penilaian Pembelajaran

Penilaian adalah elemen krusial dalam standar pendidikan karena berfungsi untuk menentukan sejauh mana siswa berhasil mencapai kompetensi yang telah ditentukan dalam rencana pembelajaran. Penilaian meliputi tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotor untuk memastikan evaluasi berlangsung secara menyeluruh. Penilaian harus dilakukan dengan cara yang

objektif, terbuka, dan berkelanjutan. Penilaian formatif dimanfaatkan untuk memantau perkembangan pembelajaran secara teratur, memberikan umpan balik, dan memperbaiki kelemahan yang ada. Di sisi lain, penilaian sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk menilai pencapaian kompetensi secara keseluruhan.

Standar penilaian juga mengharuskan guru untuk menggunakan alat ukur yang valid dan dapat diandalkan, sehingga hasil penilaian bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di bidang akademik dan administratif. Penilaian yang dilaksanakan secara profesional membantu sekolah dalam mengenali kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, yang pada gilirannya mendukung peningkatan kualitas pendidikan di tingkat nasional. (Mardapi 2017).

d. Tujuan Standar Pembelajaran Nasional

- 1) Memastikan bahwa kualitas pendidikan tersebar merata di berbagai daerah, agar semua siswa mendapatkan peluang belajar yang sama.
- 2) Menyediakan panduan bagi para pengajar untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab sekolah dan penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- 4) Menyesuaikan kemampuan lulusan dengan kebutuhan pembangunan negara dan tuntutan di tingkat internasional.
- 5) Mendukung keberhasilan penggunaan kurikulum nasional. (UNESCO 2015)

e. Penerapan Standar Pembelajaran di Indonesia Malaysia

1) Indonesia

Indonesia mengatur pedoman pendidikan melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 serta revisi melalui Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 dan No. 19 Tahun 2017. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya merata disebabkan oleh desentralisasi dan perbedaan kondisi geografi, ketersediaan tenaga pengajar, serta infrastruktur pendidikan. Perbedaan kualitas pengajar, terbatasnya akses terhadap teknologi, serta ketimpangan antar wilayah menjadi faktor utama yang menyebabkan penerapan standar pendidikan tidak selalu optimal. (Suryadi 2018)

2) Malaysia

Malaysia menerapkan norma pembelajaran melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang lebih terpusat dibandingkan dengan Indonesia. Setiap sekolah diharuskan untuk mengikuti norma pembelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan adanya sentralisasi kurikulum, pemerintah Malaysia dapat memastikan keseragaman mutu pendidikan di semua sekolah, sekaligus menekan perbedaan kualitas antar daerah. (Nair dan Alwee 2012).

f. Tantangan Implementasi Standar Pembelajaran Nasional

- 1) Keterbatasan infrastruktur, khususnya di lokasi-lokasi terpencil (World Bank, 2019, Ulasan Sektor Pendidikan).
- 2) Beragam kemampuan guru, meliputi penguasaan metode pembelajaran aktif dan teknologi.
- 3) Ketidapahaman terhadap peraturan, sehingga kriteria tidak selalu dijalankan dengan konsisten.
- 4) Pengawasan dan evaluasi yang belum maksimal, terutama di tingkat pemerintah daerah.

- 5) Perbedaan budaya dan konteks setempat, yang menyebabkan penerapan standar tidak selalu sesuai dengan kebutuhan sekolah di berbagai daerah.

g. Relevansi Standar Pembelajaran di Era Ke -21

Di zaman globalisasi dan digital, standar pendidikan nasional perlu sejalan dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dunia industri, serta keterampilan yang diperlukan di abad ke-21 seperti inovasi, kerja sama, kemampuan literasi digital, dan kemampuan berpikir analitis. Pembelajaran yang berfokus pada kompetensi dan penggunaan teknologi adalah fondasi vital untuk membentuk generasi masa depan yang fleksibel dan kreatif. Standar pendidikan berperan krusial untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan keterampilan yang diperlukan agar dapat bersaing di arena internasional.

Oleh karena itu, standar pendidikan nasional tidak hanya berfungsi sebagai acuan administratif, tetapi juga sebagai rencana strategis untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat menghadapi tantangan perubahan zaman. (OECD 2020)

4. Pengembangan Kebijakan Pendidikan.

a. Konsep Pengembangan Kebijakan Pendidikan

Pengembangan kebijakan dalam bidang pendidikan berkaitan dengan kegiatan merancang, mengevaluasi, dan memperbarui kebijakan yang menyangkut kurikulum, standar pendidikan nasional, pendanaan, perekrutan tenaga pengajar, pengelolaan sekolah, hingga penilaian hasil belajar. Kebijakan pendidikan perlu mampu menjawab perubahan sosial dengan menyeluruh. Ini memaksa pemerintah untuk secara teratur mengevaluasi kebijakan pendidikan agar tetap sejalan dengan kemajuan zaman, seperti dalam hal digitalisasi, globalisasi, dan keterampilan yang diperlukan di abad ke-21.

Di Malaysia, kebijakan pendidikan dirumuskan secara terpusat dan sangat sistematis melalui Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), sedangkan Indonesia menerapkan pendekatan yang lebih desentralisasi, memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah. (Tilaar 2012)

b. Tahapan Pengembangan Kebijakan Pendidikan

- 1) Identifikasi Masalah : Mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi masalah utama dalam pendidikan, seperti kualitas yang buruk atau ketidakmerataan fasilitas.
- 2) Formulasi Kebijakan : Menyusun alternatif solusi dengan memperhatikan sumber daya yang ada, kendala, serta melibatkan para ahli dan pihak terkait.
- 3) Penetapan Kebijakan: Pemerintah atau badan resmi mengesahkan kebijakan dan merumuskannya dalam peraturan atau panduan resmi.
- 4) Implementasi Kebijakan: Kebijakan dilaksanakan di lapangan, yang dipengaruhi oleh kesiapan guru, fasilitas, serta kapasitas sekolah untuk melaksanakannya.
- 5) Evaluasi Kebijakan : Mengukur efektivitas kebijakan dan menentukan langkah perbaikan melalui penilaian yang objektif dan terus-menerus. (Mustika, D. 2022)

c. Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kebijakan dan Pendidikan

- 1) Faktor Sosial dan Budaya : Nilai sosial, keberagaman budaya, serta pola interaksi masyarakat memengaruhi arah kebijakan pendidikan. Kebijakan harus dihormati oleh masyarakat agar mampu diterapkan dengan baik.

- 2) Faktor Ekonomi : Ketersediaan anggaran menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan. Negara dengan anggaran pendidikan tinggi cenderung berhasil menerapkan kebijakan secara merata.
 - 3) Faktor Politik : Dinamika politik dapat mempercepat atau menghambat kebijakan pendidikan. Stabilitas politik sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan kebijakan pendidikan.
 - 4) Faktor Teknologis : Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah merumuskan kebijakan baru terkait teknologi informasi, pembelajaran daring, dan literasi digital. (Suprijono 2015).
- d. Pengembangan Kebijakan Pendidikan di Indonesia dan Malaysia.
- Indonesia menerapkan kebijakan yang dapat disesuaikan dengan keadaan local. Salah satu contoh adalah Kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan kepada institusi pendidikan. Namun, Suryadi (2018) mencatat bahwa perbedaan dalam kualitas pengajar dan infrastruktur masih menjadi tantangan. Di sisi lain, Malaysia menggunakan kebijakan yang lebih terpusat seperti KSSR dan KSSM yang menjamin keseragaman kualitas pendidikan. Pendekatan terpusat ini membantu Malaysia dalam mempertahankan konsistensi dalam kualitas pendidikan. (Nair dan Alwee 2012)
- e. Tantangan Pengembangan Kebijakan Pendidikan
- 1) Ketidakseimbangan fasilitas
 - 2) Perbedaan mutu pengajar
 - 3) Minimnya pengawasan dan penilaian
 - 4) Penolakan terhadap pembaruan
 - 5) Variasi kemampuan wilayah dalam pelaksanaan

KESIMPULAN

Sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan, namun keduanya berusaha meningkatkan kualitas pendidikan. Indonesia menghadapi tantangan dalam menyamakan pendidikan karena keragaman budaya dan geografi, serta berbagai faktor seperti fasilitas dan perbedaan antara kota dan desa. Kurikulum terbaru, seperti Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, menunjukkan usaha pemerintah untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan modern. Sementara itu, Malaysia menggunakan pendekatan terpusat dengan KSSR dan KSSM untuk menjamin kualitas pendidikan, meskipun masih ada masalah terkait keragaman etnis.

Kedua negara memiliki Standar Pembelajaran Nasional yang menekankan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian untuk menjaga kualitas pendidikan. Namun, pelaksanaan standar ini terkendala oleh infrastruktur, kemampuan guru, dan pengawasan yang belum optimal. Indonesia menerapkan pendekatan desentralisasi dalam kebijakan pendidikan, sedangkan Malaysia bersifat terpusat. Proses pengembangan kebijakan melibatkan langkah-langkah tertentu, dan keberhasilannya dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Indonesia dan Malaysia perlu memperkuat standar pendidikan, meningkatkan kualitas pengajaran, membangun infrastruktur, dan merespons perubahan global untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul di era digital dan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwee, N, & Nair, S. (2012). *Malaysian Education System: Overview and Challenges*. International Journal of Social Science and Humanity. 2(2), 93-109.
- Fitria, E. (2024). Komparasi Sistem Pendidikan Finlandia dan Singapura: Studi dalam Meningkatkan Reputasi Sistem Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Genesis Indonesia*, 3(01), 34 -48.
- Jihad, A. & Suyanto, S. (2013). *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga.
- Mardapi (2017). *Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan*, Parama Publishing, Yogyakarta
- Mustika, D., Fitri, A. H., Ananda, A., Rusdinal, R., & Gistituati, N. (2022). Kajian Perbandingan Kebijakan Pendidikan Dasar Di Indonesia Dan Amerika Serika. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4356-4362.
- Niswah, K., & Sassi, K. (2023). Komparasi Sistem Pendidikan Jepang Dan Indonesia di Era Kontemporer. *Faidatuna*, 4(4), 84-103.
- OECD (2020), *Education at a Glance*, OECD Publishing
- Perkembangan Dan Tantangan*. 22(2).
- Putri, D. D., & Rahayu, S. (N.D.). *Sistem Pendidikan Di Negara-Negara Asean (Malaysia, Singapura, Filipina Dan Brunei Darussalam)*
- Sari, E. C. (2022). *Kurikulum Di Indonesia: Tinjauan Perkembangan Kurikulum Pendidikan*. Inculco Journal Of Christian Education,
- Sibuea, H. Y. P. (2017). *Pembaruan Sistem Pendidikan Di Indonesia*:
- Suprijono (2015). *Cooperative Learning: Teori & Aplikasi PAIKEM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Tilaar (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta
- UNESCO (2015), *Global Education Monitoring Report*, Paris: UNESCO Publishing
- Wurdianto, K., Juwita, D. R., Wisman, Y., & Bemisa, B. (2024). *Sistem Pendidikan Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 15(1), 1-11.